



■ KOLOM PAKAR

Menutup Celah Aksi Teror



■ LAMPUNG POST/DOK
Teuku Fahmi
Akademisi FISIP Unila

"TERORISME adalah perang psikologis. Teroris mencoba memanipulasi kita dan mengubah perilaku kita dengan menciptakan ketakutan, ketidakpastian, dan perpecahan di dalam masyarakat."

(Patrick J Kennedy).
Rentetan peristiwa aksi teror atau terorisme intens menjadi pemberitaan beberapa waktu terakhir, utamanya pasca-penunjukan Menko Polhukam Wiranto dan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2019—2024.

Belum lama, kita juga dikejutkan dengan peristiwa penggeledahan dan penangkapan sejumlah orang oleh Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri di Provinsi Lampung terkait kasus dugaan terorisme. Tak pelak, aksi teror atau terorisme menjadi "masalah sosial baru" yang tidak terhindarkan di Bumi Lampung.

Pakar yang menyatakan bila terorisme merupakan masalah sosial yang membingungkan memang benar adanya. Untuk situasi kekinian, penjelasan peristiwa terorisme tidak lagi hanya dilihat dari konteks politik, sosial, dan ekonomi.

Bahkan, lebih dari itu, terdapat interaksi yang kompleks di antara individu/kelompok yang berpartisipasi dalam aksi teror, mulai dari cara mereka menjalani kehidupan hingga bertindak/berperilaku di tengah masyarakat.

Sambungan dari Hlm. 1

Tentunya, apresiasi tinggi patut kita berikan Densus 88 Anti-teror Mabes Polri yang bertindak cepat dan mampu mendeteksi dini aksi teror, utamanya di Lampung.

Dalam dua dekade terakhir, aksi teror atau terorisme kerap terjadi di berbagai belahan bumi dan isu ini telah lama mengglobal. Sebagaimana diketahui, aksi teror telah banyak menimbulkan implikasi negatif di setiap sektor kehidupan bernegara, terutama pada sektor keamanan, politik, dan ekonomi.

Untuk itu, dunia internasional telah bersepakat menjadikan aksi teror atau terorisme sebagai suatu kejahatan multidimensional. Oleh karenanya, berbagai langkah dan upaya dalam menanggulangi kejahatan multidimensional ini terus diusahakan.

Kerangka penanggulangan terorisme di Indonesia terus mengalami penyempurnaan. Pengalaman dalam penanggulangan terorisme sejak peristiwa Bom Bali I pada tahun 2002 pun dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan dalam upaya pemberantasan terorisme.

Hal ini terlihat dari pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) pada 2010 hingga dimilikinya cetak biru (*blueprint*) pencegahan terorisme pada 2014. Dengan begitu, beragam perangkat kebijakan dan strategi dalam penanggulangan terorisme, dengan BNPT sebagai *leading sector*-nya, sejatinya diharapkan

mampu menangani permasalahan terorisme di Indonesia.

Pada konteks global, beragam upaya telah dilakukan Indonesia dalam penanggulangan terorisme. Hal ini terlihat pada keterlibatan Indonesia pada beberapa lembaga/badan yang berada di bawah naungan PBB, semisal CTITF, TPB-UNODC, dan UNCTED. Tidak hanya itu, Indonesia juga terlibat aktif dalam forum internasional lainnya semisal Global Counter-Terrorism Forum (GCTF).

Dengan partisipasi aktif dalam beragam forum penanggulangan terorisme di kancah global tersebut, pemerintah meyakini bahwa akan banyak diperoleh praktik baik (*best practice*) dalam implementasi penanggulangan terorisme di Indonesia, mulai dari (1) penguatan kapasitas para aparat penegak hukum yang menangani isu terorisme, (2) perbaikan pengelolaan lapas yang mencakup pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi, hingga (3) penanggulangan dan pemberantasan pendanaan terorisme.

Merujuk pada strategi yang digunakan dalam pemberantasan terorisme tersebut, dapat dinyatakan bahwa desain strategi yang diterapkan tersebut cukup komprehensif guna menanggulangi aksi terorisme. Meskipun demikian, perlu kiranya diperhatikan perkembangan lebih lanjut faktor-faktor yang memungkinkan berkembangnya aksi terorisme di Indonesia.

Faktor Pemicu

Berdasarkan beberapa literatur dan pendapat para pakar, penulis merangkum beberapa faktor tersebut, di antaranya (1) globalisasi. Konektivitas antarwilayah di dunia yang begitu cepat dan juga perkembangan *information and communication technology* (ITC) menjadi tantangan tersendiri dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Ini terkait dengan kemungkinan terjadinya cyberterrorism.

Lalu, (2) kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Stabilitas pada komponen tersebut memegang andil yang sangat penting dalam berkembangnya terorisme di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu menyejahterakan masyarakatnya. Bila hal ini tidak secara serius diupayakan, kredibilitas pemerintah di mata masyarakat akan berkurang. Rasa tidak puas itu dapat ditunjukkan dengan aksi-aksi yang justru menjadikan situasi makin tidak kondusif.

Kemudian, (3) keagamaan. Aksi teror yang kerap terjadi di Indonesia cenderung bermotifkan keagamaan (Golose, 2009). Radikalisme dalam pemahaman keagamaan tersebutlah yang menggerakkan para teroris untuk menjalankan aksinya. Pada akhirnya, "kekhasan" inilah yang menjadi tantangan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.

Refleksi perihal penerapan strategi penanggulangan terorisme yang mengedepankan *law enforcement* patut juga diberikan anungan jem-

pol. Penerapan *soft power* (*soft approach*) dengan mengedepankan penegakan hukum selaras dengan iklim demokrasi yang dicita-citakan.

Peran Masyarakat

Lantas, bagaimana peran kita (individu) sebagai unit terkecil dari sebuah kelompok masyarakat bila dikaitkan dengan penanggulangan terorisme? Dalam berbagai kesempatan, BNPT selalu menegaskan bila seluruh elemen bangsa harus bersama-sama meredam radikalisme dan terorisme. Hal ini menjadi penegas bahwa upaya penanggulangan terorisme merupakan tugas bersama, tidak hanya pemerintah, bahkan tiap individu pun turut andil dalam pemberantasan terorisme.

Menjadikan aksi teror atau terorisme menjadi musuh bersama setidaknya sudah menumbuhkan kesadaran kolektif yang menjadi modal penting dalam memerangi kejahatan kemanusiaan tersebut. Pada tataran praktis, kita perlu meningkatkan kewaspadaan sebagai langkah konkret memperkecil ruang gerak teroris di tengah masyarakat.

Bila tiap individu menjadi "CCTV" untuk lingkungan sekitarnya, kehadiran orang asing dengan aktivitas yang mencurigakan dapat dilaporkan secara berjenjang kepada pihak yang terkait, mulai dari ketua RT hingga Bhabinkamtibmas atau Babinsa. Kita dapat memaknainya bahwa hal ini merupakan bagian dari cegah dini tindak kejahatan terorisme. ■